



# PETUNJUK TEKNIS

## PEDOMAN PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

AKSI 6 SISTEM MANAJEMEN DATA STUNTING

AKSI 7 PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING

AKSI 8 REVIU KINERJA TAHUNAN

Edisi November 2018

## Daftar Isi

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DELAPAN AKSI INTEGRASI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING .....                                  | ii |
| AKSI INTEGRASI 6 SISTEM MANAJEMEN DATA STUNTING .....                                       | 2  |
| Tahap Pertama: Identifikasi Kebutuhan dan Kesenjangan Data .....                            | 3  |
| Tahap Kedua: Penilaian Sistem Manajemen Data Saat ini .....                                 | 10 |
| Tahap Ketiga: Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Sistem Manajemen Data .....        | 15 |
| Tahap Keempat: Reviu terhadap Perbaikan dan Pemanfaatan Sistem Data .....                   | 17 |
| AKSI INTEGRASI 7 PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING .....                                    | 20 |
| Tahap Pertama: Mempersiapkan Rencana Jadwal Pengukuran .....                                | 21 |
| Tahap Kedua: Pelaksanaan Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan .....                      | 24 |
| Tahap Ketiga: Pengelolaan Penyimpanan Data Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan ....     | 24 |
| Tahap Keempat: Pemanfaatan Hasil Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan .....              | 24 |
| Tahap Kelima: Diseminasi dan Publikasi Hasil Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan .....  | 25 |
| AKSI INTEGRASI 8 REVIU KINERJA TAHUNAN .....                                                | 28 |
| Tahap Pertama: Identifikasi Sumber Data dan Pengumpulan Data Kinerja Program/Kegiatan ..... | 29 |
| Tahap Kedua: Pelaksanaan Reviu Kinerja Tahunan Penurunan Stunting Terintegrasi .....        | 30 |
| Tahap Ketiga: Menyusun Dokumen Hasil <i>Reviu</i> Kinerja Tahunan .....                     | 34 |
| Strategi dan Mekanisme Penilaian Kinerja .....                                              | 36 |

## DELAPAN AKSI INTEGRASI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING



Aksi integrasi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam penurunan stunting. Pelaksanaan intervensi gizi penurunan stunting terintegrasi membutuhkan perubahan pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor agar program dan kegiatan intervensi gizi dapat digunakan oleh keluarga sasaran sasaran rumah tangga 1.000 HPK.



**PETUNJUK TEKNIS**

**PEDOMAN PELAKSANAAN INTERVENSI**

**PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI**

**AKSI 6 SISTEM MANAJEMEN DATA STUNTING**

## AKSI INTEGRASI 6 SISTEM MANAJEMEN DATA STUNTING

### Definisi

Sistem manajemen data intervensi penurunan *stunting* adalah upaya pengelolaan data di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Desa yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dan digunakan untuk membantu pengelolaan program dan/atau kegiatan penurunan *stunting*.

Sistem manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data, untuk memastikan adanya informasi yang akurat dan mutakhir. Kegiatan-kegiatan dalam sistem manajemen data akan bersinggungan dengan aspek kebijakan, akan menggunakan dan mendukung mekanisme yang berjalan di Kabupaten/Kota sesuai dengan alur pelaksanaan, serta tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Kebutuhan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi akan disesuaikan dengan kegiatan di setiap tingkatan pemerintahan.

1. Di tingkat desa, data akan digunakan untuk analisis situasi tingkat desa, proses perencanaan, penentuan sasaran program, pemantauan pelaksanaan kegiatan intervensi, dan penilaian kinerja (*score card*);
2. Di tingkat kecamatan, data akan digunakan untuk sosialisasi dan advokasi kepada Kepala Desa, penentuan target desa, dan pemantauan kemajuan kegiatan.
3. Di tingkat Kabupaten/kota, masing-masing OPD yang membidangi sektor yang memerlukan data untuk melakukan perencanaan kegiatan seperti dalam Analisis Situasi, Rembuk, melihat dan melakukan review capaian layanan program mereka/kinerja program, dan mengambil keputusan untuk perbaikan dan peningkatan program mereka.

### Tujuan

Tujuan umum dari pelaksanaan perbaikan sistem manajemen data *stunting* adalah untuk membantu penyediaan dan mempermudah akses data untuk pengelolaan program penurunan *stunting* secara umum. Secara khusus, sistem manajemen data ini harus dapat memastikan kebutuhan data dalam Aksi Integrasi lainnya terpenuhi, yaitu: Aksi #1 (Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*), Aksi #2 (Rencana Kegiatan), Aksi #7 (Pengukuran dan publikasi *stunting*) dan Aksi #8 terkait dengan Review Kinerja.

Pengelola program di Kabupaten/Kota melalui Bappeda dapat menggunakan data integrasi penurunan *stunting* untuk keperluan advokasi ke kepala daerah dan juga memenuhi fungsi pelaporan ke provinsi dan pusat. **Tujuan aksi perbaikan sistem manajemen data bukan untuk membangun sistem manajemen data baru** untuk *stunting* tetapi untuk memperkuat sistem-sistem yang ada di OPD, guna meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas maupun kualitas data tentang intervensi penurunan *stunting*.

## Penanggung Jawab

Penanggung jawab untuk mengkoordinir Aksi ini adalah Bappeda. Sementara OPD terkait akan bertanggung jawab terhadap ketersediaan data untuk masing-masing kegiatan program.

## Jadwal

Kegiatan aksi ini dilaksanakan sepanjang tahun anggaran untuk mendukung keseluruhan proses perencanaan penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi.

## Tahapan Kegiatan

Sistem manajemen data ini harus dapat memastikan kebutuhan data dalam Aksi Integrasi lainnya terpenuhi, yaitu: aksi #1 (Analisis Situasi), aksi #2 (Rencana Kegiatan), aksi #7 (Pengukuran dan Publikasi Stunting), dan aksi #8 terkait dengan Reviu Kinerja Tahunan.

**TAHAP 1:** Identifikasi Kebutuhan dan Kesenjangan Data

**TAHAP 2:** Penilaian Sistem Manajemen Data Saat Ini

**TAHAP 3:** Menyusun Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Sistem Data

**TAHAP 4:** Melakukan Reviu terhadap Perbaikan dan Pemanfaatan Sistem Data

## Tahap Pertama: Identifikasi Kebutuhan dan Kesenjangan Data

Bappeda dan seluruh OPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi perlu mengetahui dan memahami kebutuhan data yang akan digunakan dalam melaksanakan intervensi gizi terintegrasi. Kebutuhan data tersebut disusun berdasarkan jenis intervensi dan tingkatan wilayah pemerintahan, mulai tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota.

Data awal yang dikumpulkan pada tahap Aksi#1 (Analisis Situasi) di tahun pertama juga merupakan data *baseline* untuk indikator cakupan intervensi *stunting* yang akan dimonitor secara berkala oleh tim integrasi. Untuk memenuhi kebutuhan melakukan Aksi#1 (Analisa Situasi) dan Aksi#8 (Review Kinerja Tahunan), perlu rencana monitoring penurunan *stunting* secara lintas-sektor. Hasil identifikasi kebutuhan data dan rekomendasi kesenjangan data dari Aksi#1 (Analisis Situasi) merupakan informasi awal untuk mengidentifikasi masalah dengan ketersediaan, aksesibilitas dan/atau kualitas data intervensi *stunting*. Hasil ini juga dapat digunakan sebagai bahan diskusi pada kegiatan penyusunan rencana Aksi#6 Sistem Manajemen Data) untuk mengajak lintas sektor berkolaborasi meningkatkan kualitas dan memperbaiki sistem data yang ada di Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan penurunan *stunting*. Disarankan untuk tahun pertama, kegiatan Pemetaan atau Penilaian Sistem Manajemen Data dan Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Sistem Data menjadi salah satu kegiatan dalam Rencana Kegiatan di Aksi#2.

Pada tahapan pelaksanaan Aksi#1 (Analisis Situasi), Bappeda meminta masing-masing OPD yang membidangi program intervensi *stunting* untuk melakukan pemetaan kebutuhan dan penggunaan data berdasarkan siapa pengguna data, jenis keputusan yang perlu didukung dengan data, dan jenis data yang dibutuhkan. Sistem manajemen data mencakup data-data dari setiap indikator mulai dari data *stunting* sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Adapun contoh dari daftar indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1. Pemetaan Indikator Cakupan Intervensi Gizi Terintegrasi

| No                        | Indikator                                                               | Definisi Operasional                                                                                                        | Numerator                                                        | Denominator                                                                       | OPD Penanggung Jawab                            | Sumber Data Sistem Monitoring | Sumber Data Sistem Database | Pemetaan Ada/Tidak Ada |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>A. Indikator Utama</b> |                                                                         |                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                 |                               |                             |                        |
| 1                         | Cakupan Bumil KEK yang mendapat PMT pemulihan                           | Persentase Bumil KEK yang mendapat PMT pemulihan terhadap seluruh Bumil KEK dalam kurun waktu yang sama                     | Jumlah Bumil KEK yang mendapat PMT pemulihan                     | Jumlah seluruh Bumil KEK di wilayah tsb dalam kurun waktu satu tahun yang sama    | Dinas Kesehatan                                 |                               |                             |                        |
| 2                         | Cakupan Ibu Hamil mendapat IFA (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan | Persentase ibu hamil mendapat TTD minimal 90 tablet selama kehamilan terhadap seluruh ibu hamil dalam kurun waktu yang sama | Jumlah ibu hamil mendapat TTD minimal 90 tablet selama kehamilan | Jumlah semua ibu hamil di wilayah tsb dalam kurun waktu satu tahun yang sama      | Dinas Kesehatan                                 |                               |                             |                        |
| 3                         | Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)    | Persentase ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil terhadap jumlah semua ibu hamil                                         | Jumlah ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil                  | Jumlah semua ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun yang sama                     | Dinas Kesehatan                                 |                               |                             |                        |
| 4                         | Cakupan keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita                    | Persentase keluarga yang mengikuti BKB terhadap seluruh keluarga yang memiliki Balita                                       | Jumlah keluarga dengan balita yang mengikuti BKB                 | Jumlah semua keluarga dengan balita dalam kurun waktu satu tahun yang sama        | Dinas yang membidangi urusan keluarga berencana |                               |                             |                        |
| 5*                        | Cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT                               | Persentase balita kurus yang mendapat PMT                                                                                   | Jumlah balita kurus yang mendapat PMT pemulihan                  | Jumlah seluruh balita kurus di wilayah tsb dalam kurun waktu satu tahun yang sama | Dinas Kesehatan                                 |                               |                             |                        |
| 6*                        | Cakupan kehadiran di                                                    | Rata-rata persentasi jumlah                                                                                                 | Jumlah seluruh anak usia                                         | Jumlah anak usia 0-5                                                              | Dinas                                           |                               |                             |                        |

| No  | Indikator                                                       | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                               | Numerator                                                                                    | Denominator                                                                  | OPD Penanggung Jawab | Sumber Data Sistem Monitoring | Sumber Data Sistem Database | Pemetaan Ada/Tidak Ada |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|     | posyandu (rasio yang datang terhadap total sasaran)             | anak usia 0-5 tahun yang hadir per bulan di posyandu terhadap semua anak usia 0-5 tahun dalam wilayah kerja posyandu                                                                                                                                               | 0-5 tahun yang hadir per bulan di posyandu                                                   | tahun dalam wilayah kerja posyandu                                           | Kesehatan            |                               |                             |                        |
| 7   | Cakupan Ibu Hamil-K4                                            | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga terhadap seluruh ibu hamil dalam kurun waktu yang sama | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan              | Jumlah semua ibu hamil di wilayah tsb dalam kurun waktu satu tahun yang sama | Dinas Kesehatan      |                               |                             |                        |
| 8*  | Cakupan anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A                   | Persentase jumlah bayi usia 6-59 bulan yang memperoleh Vit. A terhadap semua bayi usia 6-59 bulan                                                                                                                                                                  | Jumlah anak usia 6-59 bulan yang memperoleh Vit. A pada bulan vitamin A Februari dan Agustus | Jumlah semua bayi usia 6-59 bulan pada tahun tsb                             | Dinas Kesehatan      |                               |                             |                        |
| 9   | Cakupan anak 12-23 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap | Persentase anak usia 12-23 bulan yang telah mendapatkan imunisasi dasar dan imunisasi lengkap terhadap semua bayi berusia 0-11 bulan                                                                                                                               | Jumlah anak usia 12-23 bulan yang telah mendapatkan imunisasi dasar dan imunisasi lengkap    | Jumlah semua bayi usia 0-11 bulan dalam kurun waktu satu tahun yang sama     | Dinas Kesehatan      |                               |                             |                        |
| 10* | Cakupan balita diare yang memperoleh                            | Persentase balita diare yang memperoleh suplementasi zinc                                                                                                                                                                                                          | Jumlah balita diare yang memperoleh                                                          | Jumlah seluruh balita diare pada kurun waktu                                 | Dinas Kesehatan      |                               |                             |                        |



| No | Indikator                                                    | Definisi Operasional                                                                                                              | Numerator                                                                                            | Denominator                                                      | OPD Penanggung Jawab | Sumber Data Sistem Monitoring | Sumber Data Sistem Database | Pemetaan Ada/Tidak Ada |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|    | suplementasi zinc                                            |                                                                                                                                   | suplementasi zinc                                                                                    | satu tahun tersebut                                              |                      |                               |                             |                        |
| 11 | Cakupan remaja putri mendapatkan TTD                         | Persentase remaja putri (13-18 tahun) yang mendapat TTD                                                                           | Jumlah remaja putri yang mendapat TTD                                                                | Jumlah seluruh remaja putri pada kurun waktu satu tahun tersebut | Dinas Kesehatan      |                               |                             |                        |
| 12 | Cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak | Persentase rumah tangga yang telah mengakses sumber air minum layak terhadap seluruh rumah tangga                                 | Jumlah rumah tangga dengan akses sumber air minum layak                                              | Jumlah seluruh rumah tangga pada tahun tsb                       | Dinas PU             |                               |                             |                        |
| 13 | Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak         | Persentase rumah tangga yang telah menggunakan sanitasi layak terhadap seluruh rumah tangga                                       | Jumlah rumah tangga yang telah menggunakan sanitasi layak                                            | Jumlah seluruh rumah tangga pada tahun tsb                       | Dinas Kesehatan      |                               |                             |                        |
| 14 | Cakupan rumah tangga peserta JKN/Jamkesda                    | Persentase penduduk yang telah menjadi peserta JKN/Jamkesda terhadap semua penduduk                                               | Jumlah penduduk yang telah menjadi peserta JKN/Jamkesda                                              | Jumlah penduduk pada tahun tsb                                   | Dinas Kesehatan      |                               |                             |                        |
| 15 | Cakupan KPM PKH yang mendapatkan FDS gizi dan kesehatan      | Persentase KPM PKH yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)/FDS gizi dan kesehatan terhadap seluruh KPM PKH | Jumlah KPM PKH yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)/FDS gizi dan kesehatan | Jumlah seluruh KPM PKH                                           | Dinas Sosial         |                               |                             |                        |
| 16 | Cakupan orang tua yang                                       | Persentase ibu hamil dan orang                                                                                                    | Jumlah ibu hamil dan                                                                                 | Jumlah ibu hamil dan anak                                        | Dinas                |                               |                             |                        |

| No                            | Indikator                                                       | Definisi Operasional                                                                                                         | Numerator                                                            | Denominator                                                                  | OPD Penanggung Jawab            | Sumber Data Sistem Monitoring | Sumber Data Sistem Database | Pemetaan Ada/Tidak Ada |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                               | mengikuti kelas parenting                                       | tua dengan baduta yang mengikuti kelas parenting                                                                             | orang tua dengan anak usia baduta yang mengikuti kelas parenting     | baduta pada tahun tersebut                                                   | Pendidikan dan Kebudayaan       |                               |                             |                        |
| 17                            | Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD   | Persentase anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD terhadap jumlah semua anak usia 2-6 tahun                   | Jumlah anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD         | Jumlah seluruh anak usia 2-6 tahun                                           | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |                               |                             |                        |
| 18                            | Cakupan keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima BPNT | Persentase keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima BPNT terhadap jumlah seluruh keluarga 1000 HPK kelompok miskin | Jumlah keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima BPNT       | Jumlah keluarga 1000 HPK kelompok miskin                                     | Dinas Sosial                    |                               |                             |                        |
| 19                            | Cakupan desa menerapkan KRPL                                    | Persentase jumlah desa yang menerapkan KRPL terhadap jumlah seluruh desa                                                     | Jumlah desa yang menerapkan KRPL                                     | Jumlah seluruh desa                                                          | Dinas Pertanian                 |                               |                             |                        |
| 20                            | Cakupan layanan Ibu Nifas                                       | Persentase ibu nifas mendapatkan pelayanan postnatal minimal 3 kali terhadap semua ibu nifas dalam kurun waktu yang sama     | Jumlah ibu nifas yang mendapatkan pelayanan postnatal minimal 3 kali | Jumlah semua ibu nifas di wilayah tsb dalam kurun waktu satu tahun yang sama | Dinas Kesehatan                 |                               |                             |                        |
| <b>B. Indikator Pelengkap</b> |                                                                 |                                                                                                                              |                                                                      |                                                                              |                                 |                               |                             |                        |
| 1*                            | Cakupan balita yang mengalami gizi buruk yang ditangani (BGM)   | Persentase balita gizi buruk yang ditangani terhadap seluruh kasus balita gizi buruk                                         | Jumlah balita gizi buruk (BGM) yang ditangani                        | Jumlah seluruh kasus balita gizi buruk (BGM) dalam kurun waktu satu          | Puskesmas                       |                               |                             |                        |

| No                                                      | Indikator                                                      | Definisi Operasional                                                                                                        | Numerator                                                     | Denominator                                                                   | OPD Penanggung Jawab | Sumber Data Sistem Monitoring | Sumber Data Sistem Database | Pemetaan Ada/Tidak Ada |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                                         |                                                                |                                                                                                                             |                                                               | tahun yang sama                                                               |                      |                               |                             |                        |
| 2                                                       | Cakupan Puskesmas yang mampu tata laksana MTBS                 | Persentase jumlah Puskesmas yang mampu tata laksana MTBS terhadap seluruh Puskesmas di Kabupaten/Kota                       | Jumlah Puskesmas yang mampu tata laksana MTBS                 | Jumlah seluruh Puskesmas di kab/kota                                          | Dinas Kesehatan      |                               |                             |                        |
| 3                                                       | Cakupan keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima PKH | Persentase keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima PKH terhadap jumlah seluruh keluarga 1000 HPK kelompok miskin | Jumlah keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai penerima PKH | Jumlah seluruh keluarga 1000 HPK kelompok miskin                              | Dinas Sosial         |                               |                             |                        |
| 4                                                       | Cakupan bayi yang memiliki akta kelahiran                      | Persentase baduta yang memiliki akta kelahiran terhadap semua baduta                                                        | Jumlah baduta yang memiliki akta kelahiran                    | Jumlah seluruh baduta pada tahun yang sama                                    | Dinas Dukcapil       |                               |                             |                        |
| 5*                                                      | Cakupan balita yang mengalami gizi buruk yang ditangani (BGM)  | Persentase balita gizi buruk yang ditangani terhadap seluruh kasus balita gizi buruk                                        | Jumlah balita gizi buruk yang ditangani                       | Jumlah seluruh kasus balita gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun yang sama | Puskesmas            |                               |                             |                        |
| <b>C. Indikator Untuk wilayah dengan kondisi khusus</b> |                                                                |                                                                                                                             |                                                               |                                                                               |                      |                               |                             |                        |
| 1                                                       | Cakupan Ibu hamil menggunakan kelambu di daerah endemis        | Persentase Bumil yang menggunakan kelambu terhadap seluruh bumil                                                            | Jumlah bumil yang menggunakan kelambu                         | Jumlah seluruh bumil                                                          | Puskesmas            |                               |                             |                        |
| 2                                                       | Cakupan Ibu hamil positif HIV mendapatkan                      | Persentase Bumil positif HIV mendapatkan pelayanan PPIA                                                                     | Jumlah Bumil positif HIV mendapatkan pelayanan                | Jumlah seluruh bumil positif HIV                                              | Puskesmas            |                               |                             |                        |

| No | Indikator                                                                                 | Definisi Operasional                                                              | Numerator                                             | Denominator           | OPD Penanggung Jawab | Sumber Data Sistem Monitoring | Sumber Data Sistem Database | Pemetaan Ada/Tidak Ada |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|    | pelayanan Prevention Mother to Child Transmition (PPIA: Pencegahan Penularan Ibu ke Anak) | terhadap seluruh bumil positif HIV                                                | PPIA                                                  |                       |                      |                               |                             |                        |
| 3* | Cakupan balita (12-59 bulan) yang memperoleh obat cacing                                  | Persentase balita (12-59 bulan) yang mendapat obat cacing terhadap seluruh balita | Jumlah balita (12-59 bulan) yang mendapat obat cacing | Jumlah seluruh balita | Puskesmas            |                               |                             |                        |

## Tahap Kedua: Penilaian Sistem Manajemen Data Saat ini

### 1. Identifikasi Sistem Manajemen Data yang Tersedia

Untuk memenuhi kebutuhan data untuk monitoring dan evaluasi upaya penurunan *stunting*, Bappeda bersama Unit Statistik Kabupaten/Kota perlu mengidentifikasi sistem data apa saja yang dimiliki oleh OPD yang digunakan untuk mengelola data tentang intervensi *stunting*. Identifikasi awal sistem-sistem yang menjadi sasaran dilakukan dalam tahap Analisis Situasi (Aksi #1).

**Tabel 6.2. Contoh Sistem Pelaporan dan Manajemen Data Terkait Intervensi Penurunan *Stunting***

| No. | OPD                             | Sistem Data                                                                                                        | Data yang tersedia                                                                                | Indikator                                                                  |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Dinas Kesehatan                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>e-Puskesmas</li> <li>e-PPGBM</li> <li>Smart STBM</li> <li>PIS-PK</li> </ul> | Data cakupan program, status gizi, data penyakit, data akses sanitasi, penggunaan data obat, dll. | Sistem data mencakup sejumlah (misalnya 11) indikator integrasi intervensi |
| 2.  | Dinas Pekerjaan Umum/Permukiman | <ul style="list-style-type: none"> <li>SIM air minum (PAMSIMAS)</li> </ul>                                         | Data akses air minum                                                                              | Mencakup sejumlah (misalnya 1) indikator                                   |
| 3.  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dapodik kabupaten</li> </ul>                                                | Data siswa, data guru, dan data sekolah                                                           | Mencakup sejumlah (misalnya 2) indikator                                   |

Selanjutnya Bappeda dan Unit Statistik Kabupaten/Kota bersama OPD perlu mengidentifikasi data apa saja yang tersedia di dalam sistem tersebut yang terkait dengan intervensi prioritas penurunan *stunting*. Contoh matriks berikut dapat digunakan untuk melakukan identifikasi system manajemen data yang telah tersedia saat ini:

**Tabel 6.3. Contoh Matriks Inventori Sistem Penyediaan Data**

| No | Jenis Data Indikator | Sumber Data                        |                            | Pengelola Sistem / OPD – Unit | Frekuensi        |                       |
|----|----------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
|    |                      | Sistem Monitoring/ Pelaporan Rutin | Sistem Informasi/ Database |                               | Pengumpulan Data | Pelaporan Data ke OPD |
| 1. | 1....<br>2....       | Laporan Puskesmas – Gizi (F3)      | XX                         | DinKes – Unit X               | Kontinu          | Bulanan               |
| 2. |                      |                                    | SIM Air Minum              | DinasPUPR                     |                  |                       |
|    | Dst....              |                                    |                            |                               |                  |                       |

## 2. Identifikasi Kesenjangan Sistem Manajemen Data

Setelah OPD melakukan analisis ketersediaan data di sektornya masing-masing dan mengumpulkan data terkait cakupan intervensi penurunan stunting, Bappeda mengundang OPD untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Disarankan kunjungan ke fasilitas layanan dilakukan dalam proses penilaian untuk melihat permasalahan atau *bottleneck* yang terjadi dalam manajemen atau aliran data.

Beberapa hal yang perlu didiskusikan dalam identifikasi kesenjangan data:

1. Data apa saja yang tersedia dan yang tidak tersedia?
2. Apakah data yang ada, tersedia secara berkala (analisis bulanan/ triwulan/ tahunan) dan dalam skala wilayah tertentu, misalnya kecamatan atau desa? Apakah mudah memperoleh data tersebut secara cepat?
3. Apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi kecukupan data? Apakah pengelola data yang ada telah memiliki kapasitas yang cukup dan diharapkan? Apakah cukup tersedia sumber daya untuk pengumpulan dan pengelolaan data?
4. Apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas data? Apakah sistem manajemen data telah memanfaatkan Teknologi Informasi? Apakah perlu ada peningkatan sistem manajemen data berbasis TI?
5. Apakah ada penanggungjawab untuk manajemen data di unit OPD terkait?
6. Apakah ada panduan atau SOP tertulis mengenai tata cara pengumpulan, pelaporan dan manajemen data (untuk OPD, untuk fasilitas layanan, untuk petugas lapangan (e.g. kader, bidan))?
7. Apakah anggaran dialokasikan untuk kegiatan pengumpulan, pelaporan dan manajemen data?
8. Apakah semua staf yang relevan telah dapat pelatihan mengenai proses dan alat manajemen data?
9. Apakah ada form standar untuk pencatatan dan pelaporan data? Apakah ini digunakan secara konsisten di seluruh fasilitas layanan?
10. Apakah ada prosedur kontrol kualitas ketika data dientri kedalam sistem Informasi?

**Tabel 6.4. Contoh Form Penilaian Sistem Manajemen dan Pelaporan Data** (*kategori dapat disesuaikan; tidak semua kategori berlaku untuk semua tingkat*)<sup>1</sup>

|                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                                |                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
|                                                                        | <b>OPD Penanggung Jawab :</b>                                                                                                                                       | <i>Dinas Kesehatan</i>           |                                   |                                |                |
|                                                                        | <b>Sistem Monitoring :</b>                                                                                                                                          | <i>Program B</i>                 |                                   |                                |                |
| <b>No.</b>                                                             |                                                                                                                                                                     | <i>Tingkat</i>                   |                                   |                                |                |
|                                                                        |                                                                                                                                                                     | <i>Posyandu<br/>(Ya / Tidak)</i> | <i>Puskesmas<br/>(Ya / Tidak)</i> | <i>DinKes<br/>(Ya / Tidak)</i> | <i>Catatan</i> |
| <b>I – Kapasitas, Tugas dan Tanggung Jawab Pemantauan dan Evaluasi</b> |                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                                |                |
| 1.                                                                     | Ada staf yang ditugaskan dengan tanggungjawab untuk manajemen data                                                                                                  |                                  |                                   |                                |                |
| 2.                                                                     | Semua posisi untuk monev dan sistem manajemen data terisi                                                                                                           |                                  |                                   |                                |                |
| 3.                                                                     | Ada staf senior yang bertanggungjawab untuk review angka agregat sebelum laporan dikeluarkan                                                                        |                                  |                                   |                                |                |
| 4.                                                                     | Ada staf yang bertanggungjawab untuk review kualitas data yang diterima dari tingkat bawah                                                                          |                                  |                                   |                                |                |
| 5.                                                                     | Ada staf yang bertanggungjawab untuk review angka agregat sebelum di kirim ke tingkat atas (e.g. ke Provinsi atau Kementerian)                                      |                                  |                                   |                                |                |
| 6.                                                                     | Tanggungjawab untuk pencatatan penyampaian pelayanan dalam dokumen sumber ditugaskan kepada staf yang relevan.                                                      |                                  |                                   |                                |                |
| 7.                                                                     | Ada rencana pelatihan yang mencakup staf yang terlibat dalam pengumpulan data dan pelaporan di semua level dalam proses pelaporan.                                  |                                  |                                   |                                |                |
| 8.                                                                     | Semua staf yang relevan telah menerima pelatihan tentang proses dan alat manajemen data.                                                                            |                                  |                                   |                                |                |
| <b>II - Persyaratan Pelaporan Data</b>                                 |                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                                |                |
|                                                                        | Ada panduan tertulis diberikan kepada semua entitas pelapor (misalnya, fasilitas layanan) tentang:                                                                  |                                  |                                   |                                |                |
| 9.                                                                     | ... <i>apa</i> yang harus dilaporkan                                                                                                                                |                                  |                                   |                                |                |
| 10.                                                                    | ... <i>bagaimana</i> (mis. format) laporan harus disampaikan.                                                                                                       |                                  |                                   |                                |                |
| 11.                                                                    | ... <i>kepada siapa</i> laporan harus disampaikan.                                                                                                                  |                                  |                                   |                                |                |
| 12.                                                                    | ... <i> kapan</i> tenggat waktu laporan harus disampaikan.                                                                                                          |                                  |                                   |                                |                |
| <b>III – Proses Manajemen Data</b>                                     |                                                                                                                                                                     |                                  |                                   |                                |                |
| 13.                                                                    | Ada dokumen standar untuk digunakan oleh semua fasilitas layanan untuk mencatat penyampaian layanan (mis. rekam medis, formulir pendaftaran pasien, register, dll.) |                                  |                                   |                                |                |

<sup>1</sup> Diadopsi dari Routine Data Quality Assessment (RDQA) Tool, The Global Fund / USAID/ Measure

|                              |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 14.                          | Instruksi yang jelas telah diberikan tentang bagaimana melengkapi pengumpulan data dan formulir / alat pelaporan.                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 15.                          | Ada formulir / alat pelaporan standar untuk digunakan oleh semua tingkat pelaporan / formulir / alat yang secara konsisten digunakan oleh semua tingkatan.                                                                            |  |  |  |  |
| 16.                          | ...dan formulir / alat standar digunakan secara konsisten oleh semua fasilitas layanan.                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 17.                          | Data yang dikumpulkan oleh sistem monitoring memiliki ketepatan yang cukup untuk mengukur indikator (yaitu, data dikumpulkan berdasarkan karakteristik spt jenis kelamin, usia, dll. jika indikator perlu disajikan secara terpisah). |  |  |  |  |
| 18.                          | Umpan balik tentang kualitas pelaporan mereka (yaitu, akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu) diberikan secara sistematis kepada semua tingkat bawah.                                                                               |  |  |  |  |
| 19.                          | Ada prosedur tertulis untuk mengatasi laporan yang terlambat, tidak lengkap, tidak akurat dan hilang; termasuk menindaklanjuti dengan tingkat bawah tentang masalah kualitas data.                                                    |  |  |  |  |
| 20.                          | [Jika ada] Ada kontrol kualitas yang berlaku ketika data dari formulir berbasis-kertas ( <i>hardcopy</i> ) dimasukkan ke komputer (misalnya, entri ganda, verifikasi entri pasca-data, dll.).                                         |  |  |  |  |
| 21.                          | [Jika ada] Ada prosedur back-up tertulis ketika entri data atau pemrosesan data elektronik.                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 22.                          | Jika ya, tanggal terakhir back-up sesuai dengan frekuensi pembaruan sistem komputer (mis. back-up mingguan atau bulanan).                                                                                                             |  |  |  |  |
| 23.                          | Data pribadi yang relevan disimpan sesuai dengan pedoman kerahasiaan nasional atau internasional.                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| 24.                          | Ada kebijakan tertulis yang menyatakan berapa lama dokumen sumber dan formulir pelaporan harus disimpan.                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 25.                          | Semua dokumen sumber dan formulir pelaporan yang relevan untuk mengukur indikator tersedia untuk keperluan audit (termasuk cetakan tanggal dalam hal sistem komputerisasi).                                                           |  |  |  |  |
| 26.                          | Ada dokumentasi yang jelas tentang langkah-langkah pengumpulan data, analisis dan / atau manipulasi yang dilakukan di setiap tingkat sistem pelaporan.                                                                                |  |  |  |  |
| 27.                          | Ada kunjungan pengawasan reguler telah terjadi dan kualitas data telah ditinjau. (Kunjungan terakhir?)                                                                                                                                |  |  |  |  |
| <b>IV – Pemanfaatan Data</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| 28.                          | Ada staf yang ditugaskan untuk menganalisis data / hasil.                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| 29.                          | Data / hasil analisis disajikan / disebarluaskan kepada pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota secara tepat waktu sehingga informasi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.                                             |  |  |  |  |



Ada beberapa permasalahan yang mungkin terjadi dalam kualitas data seperti:

- Data tidak dikumpulkan (misalnya: ada balita yang tidak dibawa ke posyandu dan tidak tercatat dalam sistem pemantauan)
- Data dikumpulkan, tetapi terjadi distorsi dalam transmisi (misalnya: terjadi perubahan data dalam transfer dari catatan di posyandu ke laporan puskesmas ke laporan OPD)
- Data dikumpulkan oleh lebih dari satu sistem, dan sistem-sistem tersebut tidak terintegrasi dengan baik
- Penyimpanan data atau *handover* yang kurang baik (misalnya: data disimpan dalam komputer)

Untuk tahap awal, penilaian kualitas data disarankan fokus pada dimensi *Akurasi (validity)*, *Keandalan (reliability)*, *Kelengkapan (completeness)*, serta *Ketepatan Waktu (timeliness)*. Beberapa dimensi kualitas data yang lain mencakup aspek *Precision* dan *Integrity*.

- Akurasi / Validitas
  - Apakah data mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di fasilitas
- Keandalan
  - Apakah data dikumpulkan menurut protokol dan prosedur standar yang tidak dapat berubah menurut siapa atau kapan pengumpulan data dilaksanakan (i.e. data diukur dan dikumpulkan secara konsisten)?
- Kelengkapan
  - Apakah semua fasilitas melapor?
  - Apakah semua elemen data yang wajib dilaporkan ada?
- Ketepatan Waktu
  - Apakah semua fasilitas melapor pada atau sebelum tenggat waktu / *deadline* yang ditentukan?

### 3. Kesiapan dalam Perbaikan Sistem Manajemen Data

- a. Bappeda menghimbau OPD untuk memastikan ketersediaan data secara rutin untuk indikator terkait stunting yang sudah tersedia.

**Sebagai contoh:**

Data prevalensi *stunting* tingkat desa sudah tersedia di Puskesmas, namun masih belum rutin diperbarui dan dikompilasi. Oleh karena itu, Bappeda meminta Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dilengkapi dan diperbarui secara rutin.

- b. Bappeda mengajak OPD untuk menyepakati perbaikan sistem data untuk indikator terkait *stunting* yang belum tersedia. Beberapa hal yang perlu disepakati adalah:
- Kekurangan data apa saja yang akan dilengkapi?
  - OPD dan sistem data mana yang akan ditingkatkan?
  - Kapan waktu pelaksanaan untuk memperbaiki data sistem?
  - Berapa anggaran yang perlu disiapkan?
- c. Setelah Bappeda bersama OPD sepakat untuk memastikan ketersediaan data secara rutin dan memperbaiki sistem data yang ada, Bappeda bersama Unit Statistik Kabupaten/Kota dan OPD bekerjasama untuk meningkatkan sistem manajemen data

## Tahap Ketiga: Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Sistem Manajemen Data

### 1. Penyusunan Rencana Perbaikan Sistem Manajemen data

Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan dan ketersediaan data pada tahap kedua (2) serta hasil penilaian sistem manajemen data, Bappeda memfasilitasi OPD menyusun langkah-langkah perbaikan untuk mendapatkan solusi jangka pendek.

#### Sebagai contoh:

Dinas Sosial memiliki data terkait penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan nama dan alamat. Data BPNT hanya mencatat data rumah tangga penerima tetapi belum mengidentifikasi apakah rumah tangga tersebut termasuk ke dalam kategori rumah tangga 1.000 HPK. Perbaikan sistem dengan menambahkan informasi tersebut akan mempermudah penyelenggaraan Aksi Integrasi.

### 2. Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kapasitas untuk Sistem Manajemen Data

Bappeda memfasilitasi OPD untuk melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas yang dibutuhkan dan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- Apa yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman OPD, fasilitas layanan, atau petugas lapangan terkait dengan sistem manajemen data?
- Apa saja alat bantu yang diperlukan?
- Apakah diperlukan pelatihan? Untuk siapa? Siapa penyelenggaranya? Siapa pelatihnya? Bagaimana pembiayaannya?

### 3. Sosialisasi Rancangan Perbaikan Sistem Manajemen Data

Bappeda mengundang OPD untuk mensosialisasikan rencana perbaikan system manajemen data untuk penurunan stunting. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan pada kegiatan sosialisasi ini:

#### a. Pra-sosialisasi

- Menyiapkan undangan sosialisasi. Kepada seluruh OPD yang terkait dengan upaya intervensi gizi terintegrasi untuk penurunan stunting.

#### Sebagai contoh:

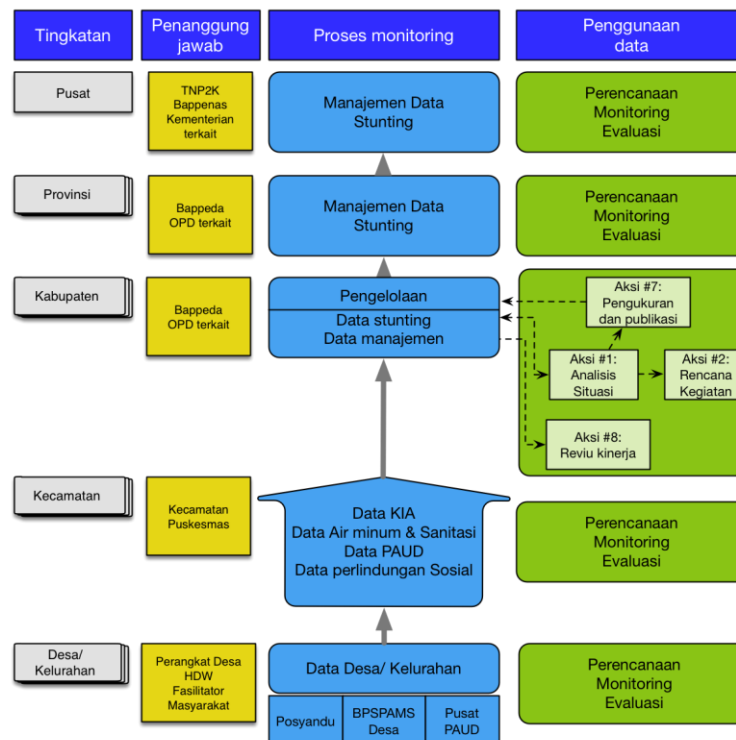
OPD yang membidangi: kesehatan, pendidikan dan budaya, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan anak, sosial, perindustrian, pekerjaan umum, pembangunan desa, pertanian, perdagangan, kelautan dan perikanan, kantor agama, obat dan makanan, dan komunikasi dan informasi

- Menyiapkan materi awal, termasuk hasil pemetaan kebutuhan dan ketersediaan data dan hasil identifikasi sistem data.

b. Sosialisasi

- Bappeda memberikan penjelasan terkait dengan:
  - Jenis kebutuhan dan ketersediaan data berdasarkan hasil pemetaan awal di Langkah kedua (2).
  - Alur pengumpulan data/aliran informasi (lihat Gambar 8.1.).
  - Tugas dan peran yang diharapkan dari OPD dalam memperkuat sistem data untuk penurunan stunting.

**Gambar 6.1. Alur Aliran Informasi dalam Aksi Integrasi di Kabupaten**



Berdasarkan pada hasil penilaian sistem, temuan-temuan tentang masalah kualitas data dapat dirangkum dalam matrix pada masing-masing sistem manajemen data yang diperlukan untuk melakukan analisis perencanaan dan monitoring intervensi stunting. Ini menjadi bahan untuk menyusun Rencana Aksi Perbaikan Sistem Data intervensi Penurunan *Stunting*.

- Bappeda memfasilitasi pemetaan ketersediaan data dengan pendekatan partisipatif. Bappeda mengonfirmasi pemetaan awal yang sudah dilakukan bersama Unit Statistik Daerah kepada OPD terkait.
- Bappeda meminta semua OPD terkait untuk melanjutkan analisis ketersediaan data dan mengumpulkan data terkait dengan cakupan intervensi penurunan stunting di sektornya masing-masing.

c. Pasca Sosialisasi

OPD melakukan analisis ketersediaan data dan mengumpulkan data terkait cakupan intervensi prioritas sebagai tindak lanjut dari pertemuan sosialisasi. Hasil dari analisis data sektor akan dibahas kembali bersama pada pertemuan berikutnya untuk mengidentifikasi kesenjangan data.

## Tahap Keempat: Reviu terhadap Perbaikan dan Pemanfaatan Sistem Data

### 1. Pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Perbaikan Sistem Data

Idealnya, Rencana Aksi Perbaikan Sistem Manajemen Data menjadi Bagian daripada Rencana Kegiatan Penurunan Stunting (Aksi #2) dan dimonitor bersamanya. Pada saat Reviu Kinerja Tahunan Penurunan Stunting (Aksi #8), kemajuan atau realisasi terhadap Rencana Aksi Perbaikan Sistem data juga akan direview. Ini mencakup: 1) review peningkatan pada ketersediaan dan kualitas data intervensi stunting yang diperlukan untuk kegiatan Reviu Kinerja Tahunan sendiri, maupun untuk proses Analisis Situasi dan Perencanaan untuk tahun berikutnya dan 2) review pelaksanaan aksi-aksi yang disepakati oleh OPD terkait. Berdasarkan pada hasil review tersebut, rencana perbaikan akan diupdate untuk tahun berikutnya

### 2. Legalisasi Kelembagaan untuk Sistem Manajemen Data

Untuk memastikan fungsi sistem manajemen terpadu dapat berjalan baik, termasuk kegiatan pemutakhiran data masing-masing program, Bupati/Walikota mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Tim Teknis Lintas Sektor untuk mengawal keterpaduan sistem.

Adapun peran dan tugas Tim Teknis Lintas Sektor untuk mengawal keterpaduan sistem ini adalah:

- a. Memastikan pelaksanaan sistem manajemen data terpadu berjalan dengan baik
- b. Memantau pemanfaatan sistem manajemen terpadu oleh para pihak di kabupaten/kota dan/atau tingkatan lainnya
- c. Melakukan analisis data pemanfaatan sistem sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pemeliharaan dan peningkatan sistem

### 3. Koordinasi dan Keterpaduan Sistem Manajemen Data

Dalam rangka melayani kebutuhan data dan memberikan informasi perkembangan program penurunan stunting di Kabupaten/Kota dan integrasi intervensi, Bappeda dapat mendorong pemanfaatan sebuah *dashboard* sistem manajemen data terpadu yang telah ada di Kabupaten/Kota. *Dashboard* sistem manajemen terpadu adalah portal atau pintu gerbang data dari sistem monitoring sektoral untuk program penurunan stunting. *Dashboard* ini tidak disarankan untuk menggantikan sistem monitoring sektoral yang ada, tapi dapat berupa pengembangan dari sistem yang ada.

*Dashboard* sistem manajemen data terpadu sebaiknya mencakup fungsi untuk:

- a. Menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh pengguna data untuk memenuhi kebutuhan pengambil keputusan
- b. Menyajikan informasi yang menjadi indikator capaian dan kinerja dari setiap OPD yang terlibat dalam program penurunan stunting
- c. Menyajikan data dalam bentuk yang menarik orang agar mau membaca dan memahaminya, misal disajikan dalam bentuk peta yang berisi angka-angka capaian, kinerja sektor dalam melaksanakan aksi, dan data hasil integrasi di setiap tingkatan pelaksanaan

*Dashboard* ini akan menjadi alat bantu bagi kepala daerah dalam memantau pelaksanaan integrasi intervensi penurunan stunting dan sebagai acuan dalam mengatur strategi percepatan pencapaian target program penurunan stunting kabupaten/kota. Dengan demikian, *dashboard*

ini akan diberikan atau bahkan diletakkan di kantor kepala daerah dan mudah diakses oleh yang bersangkutan.

Bappeda mengkoordinasikan pemanfaatan *dashboard* sistem manajemen data terpadu ini yang meliputi kegiatan:

- a. Pengenalan adanya *dashboard* manajemen data terpadu untuk meningkatkan integrasi intervensi penurunan stunting ini kepada *stakeholder* (pemangku kepentingan) di kabupaten/kota
- b. Memastikan setiap OPD memasukkan semua data sektor yang dibutuhkan dan disepakati ke dalam sistem manajemen terpadu, baik secara manual maupun menghubungkan data dalam sistem monitoring masing-masing ke dalam sistem manajemen terpadu tersebut
- c. Memantau pemutakhiran data sektor terkait secara rutin oleh masing-masing OPD penanggung jawab.

#### **4. Pemantauan terhadap Pemanfaatan Data yang tersedia pada Sistem**

Pemantauan terhadap pemanfaatan data ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak pengunjung sistem manajemen terpadu dan sebagai *proxy* (indikator penghubung) untuk mengukur berapa manfaat data yang disajikan melalui *dashboard* sistem ini. Tim teknis dapat memantau informasi pemanfaatan data yang diperoleh dari sistem manajemen data dari jumlah pengguna berdasarkan:

- a. Jenis data yang diakses
- b. Jenis data yang diunduh
- c. Wilayah dan lembaga pengguna. Informasi tentang institusi mana yang mengunduh dapat diketahui dengan pra-kondisi: setiap pengguna yang datang ke *dashboard* perlu mengisi informasi data pengguna

#### **5. Analisis terhadap Tingkat Pemanfaatan Sistem Manajemen Data**

Tim teknis dapat membuat analisis sederhana *trend* pemanfaatan data dalam bentuk grafik untuk kerangka waktu tertentu. Kemudian Bappeda dapat memberikan masukan kepada OPD lintas sektor terkait hasil analisis data ini. Masukan ini mengandung umpan balik terhadap jenis data-data yang jarang diakses/dilihat dan dapat dikaitkan dengan kapan pemutakhiran data tersebut terakhir dilakukan.

#### **6. Penyusunan tindak lanjut peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan sistem manajemen data**

Bappeda bersama Tim Teknis Lintas Sektor menyusun aksi tindak lanjut peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan sistem manajemen data berdasarkan hasil analisis pemanfaatan data yang telah dijadikan umpan balik kepada setiap OPD dan telah mendapat respon dari masing-masing OPD.

-----oOo-----



**PETUNJUK TEKNIS**

**PEDOMAN PELAKSANAAN INTERVENSI**

**PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI**

**AKSI 7 PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING**

## AKSI INTEGRASI 7 PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING

### Definisi

Pengukuran dan publikasi angka *stunting* adalah upaya Kabupaten/Kota untuk memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa. Hasil pengukuran tinggi badan anak di bawah lima tahun serta publikasi angka *stunting* digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan bersama penurunan *stunting*. Tata cara pemantauan pertumbuhan anak tetap berpedoman pada regulasi Kementerian Kesehatan atau kebijakan lainnya yang berlaku.

### Tujuan

Tujuan pengukuran dan publikasi angka *stunting* adalah:

1. Mengetahui status gizi anak sesuai umur, sehingga Kabupaten/Kota mampu:
  - Memantau kemajuan pada tingkat individu.
  - Mengembangkan program/kegiatan yang sesuai untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk menjaga pertumbuhan anak balita yang optimal.
  - Menyediakan upaya tindak lanjut terintegrasi dan konseling dalam rangka komunikasi perubahan perilaku.
2. Mengukur prevalensi *stunting* di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota secara berkala yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota sebagai bahan untuk:
  - Peningkatan efektivitas penentuan target layanan dan pengalokasian sumber daya.
  - Pemecahan masalah dan memantu proses perencanaan di level desa hingga kabupaten/kota.
  - Advokasi kepada unit-unit terkait di pemerintah daerah untuk integrasi program.

### Penanggung Jawab

Kegiatan pengukuran tinggi badan anak di bawah lima tahun dan publikasi data *stunting* di Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan mengkoordinasikan kegiatan tersebut dengan OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.

### Jadwal

Mempertimbangkan pentingnya ketersediaan dan keandalan data *stunting* (dan status gizi secara umum) di tingkat kecamatan dan desa maka kegiatan ini dilakukan secara rutin.

### Tahapan Kegiatan

**TAHAP 1:** Mempersiapkan Rencana Jadwal Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

**TAHAP 2:** Melaksanakan Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

**TAHAP 3:** Mengelola Penyimpanan Data Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

**TAHAP 4:** Memanfaatkan Hasil Data Pengukuran untuk Memantau Kemajuan

**TAHAP 5:** Desiminasi dan Publikasi Hasil Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

## Tahap Pertama: Mempersiapkan Rencana Jadwal Pengukuran

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat rencana kerja pengukuran *stunting* sesuai dengan opsi *platform* yang dipilih (lihat tabel Platform Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak yang dapat dimanfaatkan untuk Penurunan Stunting)
2. Rencana kerja mencakup rencana pengumpulan data, frekuensi, waktu pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

### Contoh Sumber Daya yang mungkin diperlukan:

pembiayaan, sumber daya manusia, pelatihan, pengumpulan data, sistem kendali mutu, dan pelaporan serta diseminasi hasil pengukuran

3. Identifikasi berbagai sumber daya yang diperlukan, seperti:
  - a. **Sumber Daya Manusia adalah:** tenaga kesehatan terlatih seperti Bidan, Tenaga Pelaksana Gizi, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan kader Posyandu.
  - b. **Alat-alat yang diperlukan termasuk:** alat-alat ukur Anthropometri panjang badan dan tinggi badan, Tikar Pertumbuhan untuk anak di bawah dua tahun dan alat pengukur tinggi badan (*height chart*) untuk deteksi dini gangguan pertumbuhan pada anak berusia di atas dua tahun, tabel konversi umur anak, dan bukti otentik umur anak seperti akta kelahiran dan buku KIA.
4. Pelatihan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan balita.
  - a. Modul Pelatihan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan sudah tersedia dan terakreditasi oleh badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan.
  - b. Tenaga kesehatan diharapkan mampu melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan balita, mampu melakukan interpretasi indikator pertumbuhan balita, dan mampu melakukan konseling pertumbuhan dan pemberian makan sebagai tindak lanjut hasil pengukuran.
  - c. Pelatihan penggunaan Tikar Pertumbuhan dan alat pengukur tinggi badan (*height chart*) sebagai alat bantu deteksi dini gangguan pertumbuhan secara kuantitatif pada anak berusia di atas dua tahun dapat diberikan untuk kader secara berkala. Pelatihan penggunaan Tikar Pertumbuhan dan alat pengukur tinggi badan (*height chart*) untuk KPM dan kader Posyandu dapat dilakukan oleh fasilitator kecamatan atau tenaga kesehatan terlatih. Modul pelatihan menggunakan Tikar Pertumbuhan sudah tersedia dalam bentuk manual buku saku Kader Pembangunan Manusia.
5. Pengukuran status gizi dapat dilakukan melalui data rutin maupun data survei. Pengukuran status gizi mengikuti aturan standar anthropometri penilaian status gizi anak yang tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010.



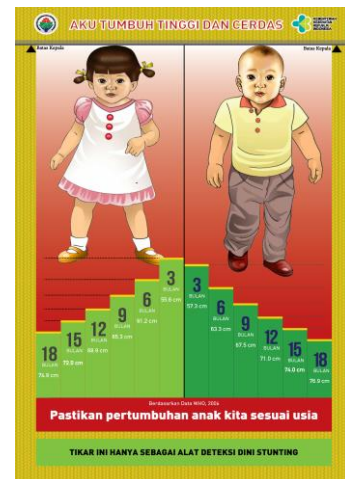
**Tabel 7.1. Standar Anthropometri Penilaian Status Gizi Anak**

| No | Indikator | Status Gizi   | Z-Score          |
|----|-----------|---------------|------------------|
| 1. | BB/U      | Gizi Buruk    | <-3SD            |
|    |           | Gizi Kurang   | -3 SD s/d <-2 SD |
|    |           | Gizi Baik     | -2SD s/d 2SD     |
|    |           | Gizi Lebih    | > 2SD            |
| 2. | TB/U      | Sangat Pendek | <-3SD            |
|    |           | Pendek        | -3 SD s/d <-2 SD |
|    |           | Normal        | >= -2SD          |
| 3. | BB/TB     | Sangat Kurus  | <-3SD            |
|    |           | Kurus         | -3 SD s/d <-2 SD |
|    |           | Normal        | -2SD s/d 2SD     |
|    |           | Gemuk         | > 2SD            |

Idealnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di Posyandu dilakukan **rutin setiap bulan** sekali oleh tenaga kesehatan dibantu oleh KPM dan kader Posyandu. Namun untuk pengukuran panjang badan bayi dan Baduta (0-23 bulan) atau tinggi badan Balita (24-59 bulan) dapat dilakukan minimal **tiga bulan sekali sesuai ketentuan yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 tahun 2014**.

Pengukuran *stunting* dilakukan dengan mengukur panjang badan untuk anak di bawah dua (2) tahun dan tinggi badan untuk anak berusia dua tahun ke atas dengan menggunakan alat antropometri yang tersedia di Puskesmas (*length board* and *microtoise*). Diharapkan dalam kurun waktu tiga (3) bulan, semua anak balita di desa sudah dapat diukur status gizinya.

Jika alat pengukuran antropometri belum tersedia atau terbatas maka tika pertumbuhan dapat digunakan sementara sebagai alat deteksi dini risiko *stunting*. Anak yang terdeteksi *stunting* akan dirujuk ke Puskesmas untuk validasi pengukuran oleh tenaga gizi atau bidan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Kader kemudian akan melakukan tindak lanjut memberikan konseling yang dibutuhkan di Posyandu. Jika anak/orang tuanya tidak hadir di Posyandu, konseling dilakukan melalui kunjungan ke rumah dengan memanfaatkan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Bersama Kader Posyandu dan/atau bidan, KPM memfasilitasi pengukuran tinggi badan dengan Tika Pertumbuhan di Posyandu.



**Tabel 7.2. Platform Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan Anak untuk Penurunan *Stunting***

| No. | Platform                                                                                                                                                                                                                                           | Kelebihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kekurangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pada kegiatan Posyandu, pertumbuhan dan perkembangan dipantau rutin <u>tiga bulan sekali</u> oleh tenaga kesehatan, dan pengukuran dengan Tikar Pertumbuhan/height chart dilakukan oleh kader dan dipantau serta divalidasi oleh tenaga kesehatan. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Posyandu dilakukan setiap bulan</li> <li>• Ada tenaga kesehatan dan kader terlatih yang dapat melakukan pengukuran dengan benar</li> <li>• Modul pelatihan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan untuk tenaga kesehatan sudah tersedia dan terakreditasi</li> <li>• Hasil pengukuran dapat digunakan untuk pintu masuk komunikasi perubahan perilaku termasuk konseling</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak semua Posyandu aktif</li> <li>• Tikar Pertumbuhan/height chart belum tersedia di semua Posyandu</li> <li>• Tidak semua tenaga kesehatan dan kader sudah mendapat pelatihan untuk pengukuran tinggi badan</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |
| 2.  | Kegiatan pengukuran panjang badan atau tinggi badan bersamaan dengan bulan penimbangan balita (dan distribusi kapsul vitamin A) dilakukan <u>dua kali dalam setahun</u> yang dikoordinasikan oleh dinas kesehatan                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data tersedia dalam waktu cepat</li> <li>• Kualitas pengukuran lebih mudah dipantau</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat pengukuran tinggi badan</li> <li>• Pembiayaan dan logistik tersendiri</li> <li>• Sumber daya manusia yang lebih banyak</li> <li>• Pelatihan dan pelatihan ulang/penyegaran tersendiri sebelum pengumpulan data dan standarisasi untuk <i>quality assurance</i></li> </ul>                                                                                                                                  |
| 3.  | Data survei gizi kabupaten/kota setahun sekali atau lima tahun sekali.                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menentukan prevalensi kabupaten/kota,</li> <li>• Dapat mengetahui informasi faktor-faktor penyebab <i>stunting</i>.</li> <li>• Data diperoleh secara independen dan objektif bila dilakukan oleh tim peneliti (surveyor), sehingga kualitas data lebih terjamin.</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak tersedia data <i>stunting</i> desa sehingga sulit untuk menentukan target dan melakukan prioritas wilayah dan intervensi.</li> <li>• Alat pengukuran tinggi badan.</li> <li>• Pembiayaan dan logistik tersendiri.</li> <li>• Sumber daya manusia yang lebih banyak.</li> <li>• Tidak rutin dilakukan.</li> <li>• Jeda antar survei yang lama seperti setiap tiga tahun atau setiap lima tahun.</li> </ul> |

## Tahap Kedua: Pelaksanaan Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berpedoman pada tata laksana pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Puskesmas dan Posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak serta memastikan alur informasi masuk dalam sistem data, termasuk untuk penyusunan laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu memastikan ketersediaan alat ukur sesuai standar yang secara rutin dikalibrasi, serta memastikan keakuratan umur anak melalui catatan resmi seperti akta kelahiran atau buku KIA.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu memastikan bahwa Tenaga Petugas Gizi, Bidan, dan KPM telah mendapatkan pelatihan anthropometri pengukuran panjang/tinggi badan anak Balita.
5. Dinas Kesehatan dan Puskesmas perlu melakukan kendali mutu ke Posyandu. Kendali mutu perlu dilakukan secara acak dengan melakukan pengukuran ulang dalam waktu yang berdekatan dengan hari pengukuran sebelumnya yang dilakukan oleh Bidan, tenaga pelaksana gizi, KPM dan kader kesehatan lainnya.
6. Pengukuran *stunting* di Posyandu secara rutin perlu dilakukan untuk mendapatkan data prevalensi *stunting* baik di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota dan dilaporkan secara berjenjang dari Posyandu ke Puskesmas, dan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan.
7. Semua anak berumur di bawah lima tahun di Desa harus diukur di Posyandu untuk mendapatkan data prevalensi *stunting* yang akurat.
8. Pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak Balita menggalang partisipasi aktif masyarakat untuk akuntabilitas sosial, yakni bertindak bersama-sama dan meningkatkan perhatian serta pengawasan terhadap integrasi dan kinerja tenaga kesehatan dan gizi dan kader lainnya.

## Tahap Ketiga: Pengelolaan Penyimpanan Data Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus membangun sistem informasi yang memuat hasil pengukuran tumbuh kembang Balita terutama *stunting* secara berjenjang dari Posyandu ke tingkat yang lebih tinggi, baik secara manual maupun *online*.
2. Data-data tersebut harus terus diperbarui agar selalu mutakhir, sesuai dengan perubahan yang terjadi pada balita yang dijumpai pada saat dilakukan pengukuran di *platform* pemantauan tumbuh kembang balita.

## Tahap Keempat: Pemanfaatan Hasil Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menggunakan data hasil pengukuran tumbuh kembang anak Balita untuk melakukan analisis sebagai berikut:

1. Menilai kemajuan pada tingkat individu  
Untuk mengidentifikasi bahwa seorang anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan secara normal atau bermasalah sehingga harus segera dinilai ulang.
2. Menilai kemajuan pada tingkat keluarga  
Untuk menunjukkan pola persoalan kesehatan di tingkat keluarga yang berkontribusi pada kejadian *stunting*.

3. Menilai kemajuan pada tingkat RT/RW/Kelurahan/Desa  
Untuk menunjukkan kemajuan masalah kesehatan prioritas yang dihadapi oleh masing-masing RT/RW/Kelurahan/Desa dan untuk menentukan RT/RW/Kelurahan/Desa mana yang memerlukan perhatian khusus.
4. Menilai kemajuan pada Kecamatan  
Untuk mengidentifikasi faktor pemicu *stunting* dan potensi yang dimiliki untuk mengatasi atau mengurangi faktor risiko.
5. Menilai kemajuan pada Kabupaten/Kota  
Hasil penilaian kemajuan pada Kabupaten/Kota menjadi masukan dalam Analisis Situasi, terutama untuk menunjukkan kecamatan dan Desa yang perlu mendapat perhatian khusus dan mengindikasikan kegiatan yang perlu dimasukkan dalam Rencana Kegiatan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi.

### Tahap Kelima: Diseminasi dan Publikasi Hasil Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengolah data hasil pengukuran dengan mengikuti kaidah-kaidah pengolahan data yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui pedoman penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota.

#### Contoh analisis data yang dapat dilakukan:

1. **Analisis *trend*:** menghitung prevalensi anak *stunting* dibandingkan prevalensi bulan/tahun lalu.
2. **Analisis menurut demografi dan geografi** (jenis kelamin, umur, jenis pekerjaan KK, tingkat Pendidikan KK, status ekonomi KK, desa/kota, dll.) sehingga dapat dilihat perbandingan kejadian pada masing-masing kelompok sehingga dapat dipetakan kelompok mana yang lebih berisiko *stunting*.
3. **Analisis komparatif:** menjelaskan hasil pengukuran satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain atau dibandingkan target/standar tertentu (misalnya angka prevalensi nasional).
4. **Analisis hubungan dalam program/antar program:** data prevalensi *stunting* dapat disajikan dengan mengemukakan hasil analisis hubungannya dengan data capaian program-program intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif pada wilayah yang sama. Dengan demikian dapat dinilai faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan (atau kegagalan). Hasil pengukuran selanjutnya dapat dianalisis untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, masalah sumber daya, dan masalah-masalah lain yang berkaitan.

2. Langkah-langkah yang dapat digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam publikasi adalah sebagai berikut:
  - a. Identifikasi target audiens  
Audiens umum meliputi pemangku kepentingan dan pengambil keputusan (misalnya, Bappeda, Dinas dan OPD, anggota DPRD), kelompok masyarakat sipil dan lain-lain yang tertarik untuk mengetahui lebih banyak mengenai prevalensi *stunting* dan penyebab yang mendasarinya.
  - b. Tentukan tujuan diseminasi dan publikasi  
Meningkatkan kesadaran akan hasil yang dicapai, mempengaruhi perilaku pembuat keputusan, advokasi untuk reformasi di antara pembuat kebijakan, atau menginformasikan kepada tim tentang langkah-langkah selanjutnya.

- c. Menyusun rencana publikasi sesuai platform pengawasan dan pengendalian yang tersedia. Publikasi dapat digunakan sebagai pemicu bagi pemangku kepentingan untuk meninjau proses kegiatan yang sudah berjalan maupun melihat kembali hasil kegiatan dalam mengidentifikasi hambatan dan penyimpangan dari yang sudah direncanakan. Publikasi juga bisa menjadi bahan untuk proses penetapan tindakan koreksi yang akan diambil dalam rangka menjamin tercapainya target sesuai dengan yang direncanakan.
3. Hasil analisis data selanjutnya digunakan untuk diseminasi dan publikasi hasil pengukuran. Berbagai saluran penyebaran informasi yang tersedia di Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk diseminasi dan publikasi hasil pengukuran tumbuh kembang Balita terutama angka *stunting*. Diseminasi dan publikasi hasil pengukuran *stunting* dapat dilakukan di berbagai tingkat sebagai berikut:
    - a. Tingkat Desa  
Angka *stunting* dapat menjadi bagian dari instrumen Suvey Mawas Diri (SMD) yang pendataannya dapat dilakukan oleh wakil masyarakat. Melalui SMD masyarakat dapat mengenal masalah *stunting* dan memetakan potensi yang dimiliki masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini penting untuk diidentifikasi oleh masyarakat sendiri, selanjutnya masyarakat dapat digerakkan untuk berperan serta aktif memperkuat upaya-upaya perbaikannya, sesuai batas kewenangannya.
    - b. Tingkat Kecamatan  
Diseminasi angka *stunting* dalam Lokakarya Mini Bulanan dapat dilakukan pada tingkat Puskesmas Kecamatan untuk menyusun secara lebih terinci kegiatan-kegiatan terkait *stunting* yang akan dilaksanakan selama bulan berjalan, menggalang kerja sama dan koordinasi antar-petugas Puskesmas (lintas program), dan meningkatkan motivasi petugas-petugas Puskesmas dalam pelaksanaan integrasi kegiatan *stunting*.  
Diseminasi prevalensi angka *stunting* di Lokakarya Mini Tribulanan Lintas Sektor dapat dimanfaatkan Puskesmas untuk:
      - Menetapkan secara konkrit dukungan lintas sektor yang akan dilakukan selama bulan berjalan, melalui sinkronisasi/harmonisasi RKP antar-sektor (antar-instansi) dan kesetupaduan tujuan penurunan *stunting*.
      - Menggalang kerja sama, komitmen, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan intervensi *stunting* terintegrasi di tingkat kecamatan.
      - Meningkatkan motivasi dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat kecamatan.
    - c. Tingkat Kabupaten/Kota  
Pada tingkat Kabupaten/Kota analisis data *stunting* dapat didiseminasikan melalui Buku Profil Kesehatan Kabupaten/Kota yang dapat didistribusikan kepada:
      - Bupati/Walikota/Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota.
      - Instansi tingkat Kabupaten/Kota termasuk Bappeda dan sektor terkait.
      - Puskesmas dan UPT kesehatan lainnya, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.
      - Dinas Kesehatan Provinsi.
      - Kementerian Kesehatan c.q. Pusat Data dan Informasi.
      - Pemangku Kepentingan lainnya (contoh: akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta)



**PETUNJUK TEKNIS**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN INTERVENSI**  
**PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI**  
**AKSI 8 REVIU KINERJA TAHUNAN**

## AKSI INTEGRASI 8 REVIU KINERJA TAHUNAN

### Definisi

Reviu Kinerja Tahunan adalah reviu yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir. Reviu dilakukan dengan:

1. Membandingkan antara rencana dan realisasi capaian *output* (target kinerja), capaian *outcome*, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja *output* dan *outcome*
3. Merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya.

Hasil reviu kinerja menjadi masukan dalam melakukan Analisis Situasi (Aksi #1) untuk penyusunan Rencana Kegiatan (Aksi #2) tahun berikutnya.

### Tujuan

Reviu kinerja tahunan bertujuan untuk:

1. Mendapatkan informasi tentang capaian kinerja program dan kegiatan penurunan *stunting*,
2. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan Rencana Kegiatan penurunan *stunting* yang telah disepakati pada Rembuk *Stunting*, dan
3. Mengidentifikasi pembelajaran dan merumuskan masukan perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus, serta desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya.

### Output

Output dari kegiatan ini adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai:

1. Kinerja program/kegiatan penurunan *stunting* dalam hal realisasi output (target kinerja cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif),
2. Realisasi rencana kegiatan penurunan *stunting*.
3. Realisasi anggaran program/kegiatan penurunan *stunting*
4. Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja dan identifikasi alternatif solusi.
5. Perkembangan capaian *outcome* (*angka prevalensi stunting*).
6. Rekomendasi perbaikan.

Adapun cakupan reviu kinerja tahunan meliputi:

1. Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Integrasi kabupaten/kota
2. Realisasi rencana kegiatan penurunan *stunting* tahunan daerah.
3. Pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi *stunting*.

### Penanggung Jawab

Penanggung jawab reviu kinerja ini adalah Sekretaris Daerah dan Bappeda. Sekretaris Daerah bertanggung jawab untuk memimpin dan mensupervisi proses dan hasil reviu. Bappeda bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyiapan materi reviu. Dalam pelaksanaannya, dibentuk Tim

Pelaksana Reviu Kinerja yang melibatkan seluruh OPD yang bertanggung jawab untuk penyediaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

### Waktu Pelaksanaan

Reviu kinerja dilakukan setelah tahun anggaran berakhir. Idealnya dilakukan pada Januari sampai dengan Februari tahun  $n+1$  sehingga informasi hasil reviu kinerja dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk proses penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya.

### Tahapan Kegiatan

**TAHAP 1:** Identifikasi Sumber Data dan pengumpulan Data Kinerja Program/Kegiatan

**TAHAP 2:** Pelaksanaan Reviu Kinerja Tahunan Penurunan Stunting Terintegrasi

**TAHAP 3:** Menyusun Dokumen Hasil *Reviu* Kinerja Tahunan

### Tahap Pertama: Identifikasi Sumber Data dan Pengumpulan Data Kinerja Program/Kegiatan

Reviu Kinerja Tahunan *Stunting* dilaksanakan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, antara lain:

1. Rencana Kegiatan (Aksi #2).
2. Dokumen perencanaan tahunan daerah: KUA PPAS, Renja OPD.
3. Dokumen anggaran daerah: APBD, APBD Perubahan (jika ada).
4. Data realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan terkait *stunting*.
5. Laporan realisasi anggaran.
6. Hasil pengukuran dan publikasi stunting (Aksi #7)
7. Skor integrasi tingkat desa (*village score card*) jika tersedia.

Untuk memperkaya informasi pada laporan kinerja, dapat digunakan sumber data lain di luar dokumen pemerintah daerah termasuk informasi yang berasal dari organisasi masyarakat sipil, universitas, dan masyarakat.

Data yang dikumpulkan sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai:

- a. Realisasi output kegiatan (dan perbandingannya terhadap target)
- b. Cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif
- c. Perkembangan cakupan keluarga sasaran yang mengakses intervensi gizi secara simultan (pada tingkat desa dan tingkat kecamatan)
- d. Perkembangan prevalensi dan kasus stunting
- e. Penyerapan anggaran
- f. Penggunaan dana desa untuk penurunan *stunting*

Data dan informasi untuk bahan perbandingan tersebut didapatkan dari beberapa sumber:

1. Laporan rutin OPD terkait.
2. Laporan pelaksanaan anggaran dan capaian target kegiatan dari masing-masing Badan Pengelola Keuangan, Bagian Administrasi Pembangunan, atau instansi lain yang melakukan kegiatan pengumpulan data capaian.



Kegiatan Reviu Kinerja Tahunan ini tidak mengharuskan OPD untuk membuat laporan tersendiri dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi Reviu Kinerja.

Informasi yang dikumpulkan bersumber dari laporan rutin yang dibuat untuk memenuhi kewajiban pelaporan Pemda. Namun, jika diperlukan Bappeda dapat meminta informasi secara khusus kepada OPD terkait.

#### **Pelaporan untuk *Reviu Kinerja Tahunan Stunting***

- Untuk kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik atau Non-Fisik, maka OPD bisa mengumpulkan laporan realisasi penggunaan anggaran dan realisasi output kegiatan DAK kepada Tim Pelaksana dengan menggunakan laporan yang dikumpulkan melalui OM SPAN (untuk DAK Fisik) dan pelaporan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis (untuk DAK Non-Fisik).
- Jika ada kegiatan terkait penurunan *stunting* yang dibiayai oleh sumber pendanaan di luar APBN, APBD, dan APBDes, maka OPD terkait melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan laporan dari penanggung jawab kegiatan dan pengamatan di lapangan.

### **Tahap Kedua: Pelaksanaan Reviu Kinerja Tahunan Penurunan Stunting Terintegrasi**

#### **1. Melakukan Perbandingan antara Dokumen Rencana dan Realisasi**

Tim Pelaksana Reviu Kinerja membuat perbandingan antara:

- Target dan realisasi *output* (kinerja) dari setiap program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kegiatan (Aksi #2).
- Target dan capaian cakupan intervensi gizi.
- Target dan perkembangan capaian *outcome* (kasus stunting).
- Rencana dan realisasi pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Integrasi.
- Alokasi anggaran dan realisasi penyerapan program/kegiatan terkait penurunan *stunting*.

Untuk memudahkan analisis kinerja, Tim Pelaksana dapat menggunakan matriks bantu seperti contoh di bawah ini disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.

#### **Contoh Matriks Reviu Kinerja**

Kabupaten/Kota :

Tahun Anggaran :

| Program                                                                | Kegiatan                  | Indikator Kinerja Keluaran (Output) | OPD      | Capaian Output |           | Anggaran (juta rupiah) |           | Permasalahan/ Kendala | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
|                                                                        |                           |                                     |          | Target         | Realisasi | Alokasi                | Realisasi |                       |                           |
| A. Program/Kegiatan Yang Terkait Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif |                           |                                     |          |                |           |                        |           |                       |                           |
| Pembinaan Kesehatan Masyarakat                                         | Peningkatan Kesehatan Ibu | Ibu hamil diperiksa K4              | Dinkes   |                |           |                        |           |                       |                           |
|                                                                        |                           | Akses air minum                     | Dinas PU |                |           |                        |           |                       |                           |
| Dst                                                                    |                           |                                     |          |                |           |                        |           |                       |                           |

| Program                                   | Kegiatan | Indikator Kinerja Keluaran (Output) | OPD     | Capaian Output |           | Anggaran (juta rupiah) |           | Permasalahan/ Kendala | Rekomendasi Tindak Lanjut |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------|----------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
|                                           |          |                                     |         | Target         | Realisasi | Alokasi                | Realisasi |                       |                           |
| B. Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Integrasi |          |                                     |         |                |           |                        |           |                       |                           |
|                                           |          | Analisis Situasi                    | Bappeda |                |           |                        |           |                       |                           |
|                                           |          | Rembuk Stunting                     | Sekda   |                |           |                        |           |                       |                           |
|                                           |          | Dst.                                |         |                |           |                        |           |                       |                           |

## 2. Mengidentifikasi Capaian Kinerja Yang Rendah atau Tinggi

Berdasarkan informasi yang telah terkumpul, Tim Pelaksana melakukan identifikasi:

- Kegiatan dalam Rencana Kegiatan yang belum terealisasi.
- Daftar Aksi Integrasi yang belum terealisasi.
- Intervensi terkait penurunan *stunting* yang capaiannya rendah.
- Program/kegiatan yang kinerja keuangan dan kinerja kegiatan (*output*)-nya rendah.
- Program/kegiatan yang kinerja keuangan dan kinerja kegiatan (*output*)-nya tinggi (sangat baik).
- Catatan atas pelaksanaan program/kegiatan berupa hambatan pelaksanaan kegiatan atau saran-saran lain dari OPD.

Tim Pelaksana kemudian **membuat** kompilasi/menghimpun hasil identifikasi dalam bentuk dokumen tertulis. Diharapkan dokumen yang dihasilkan mencakup informasi sebagai berikut:

### Cakupan Dokumen Capaian Kinerja

- Kinerja pelaksanaan Rencana Kegiatan:**
  - Apakah kegiatan yang tercantum dalam rencana kegiatan dilaksanakan (Ya/Tidak untuk tiap butir Rencana Kegiatan)?
  - Berapa persen tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan?
- Kinerja pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Integrasi Daerah**
  - Apakah Daerah sudah melaksanakan Aksi Integrasi yang direncanakan? (Ya/Tidak untuk delapan komponen Aksi Integrasi)?
  - Berapa persen tingkat kesesuaian hasil pelaksanaan Aksi Integrasi dengan tujuan masing-masing aksi sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan?
- Kinerja pelaksanaan intervensi, program/kegiatan terkait *stunting*:**
  - Bagaimana capaian realisasi target intervensi utama penurunan *stunting*?
  - Berapa anggaran yang dialokasikan untuk program/kegiatan terkait penurunan *stunting*?
  - Berapa persen realisasi anggaran program/kegiatan terkait penurunan *stunting*?
  - Berapa persen cakupan output program/kegiatan terkait penurunan *stunting*?
  - Berapa persen tingkat kenaikan cakupan layanan pada program prioritas?
  - Berapa persen tingkat kenaikan integrasi layanan pada rumah tangga 1.000 HPK (dibandingkan *baseline* tahun sebelumnya/hasil monitoring KPM)?

## 3. Pertemuan Konsultasi Hasil Reviu Kinerja Bersama Lintas OPD

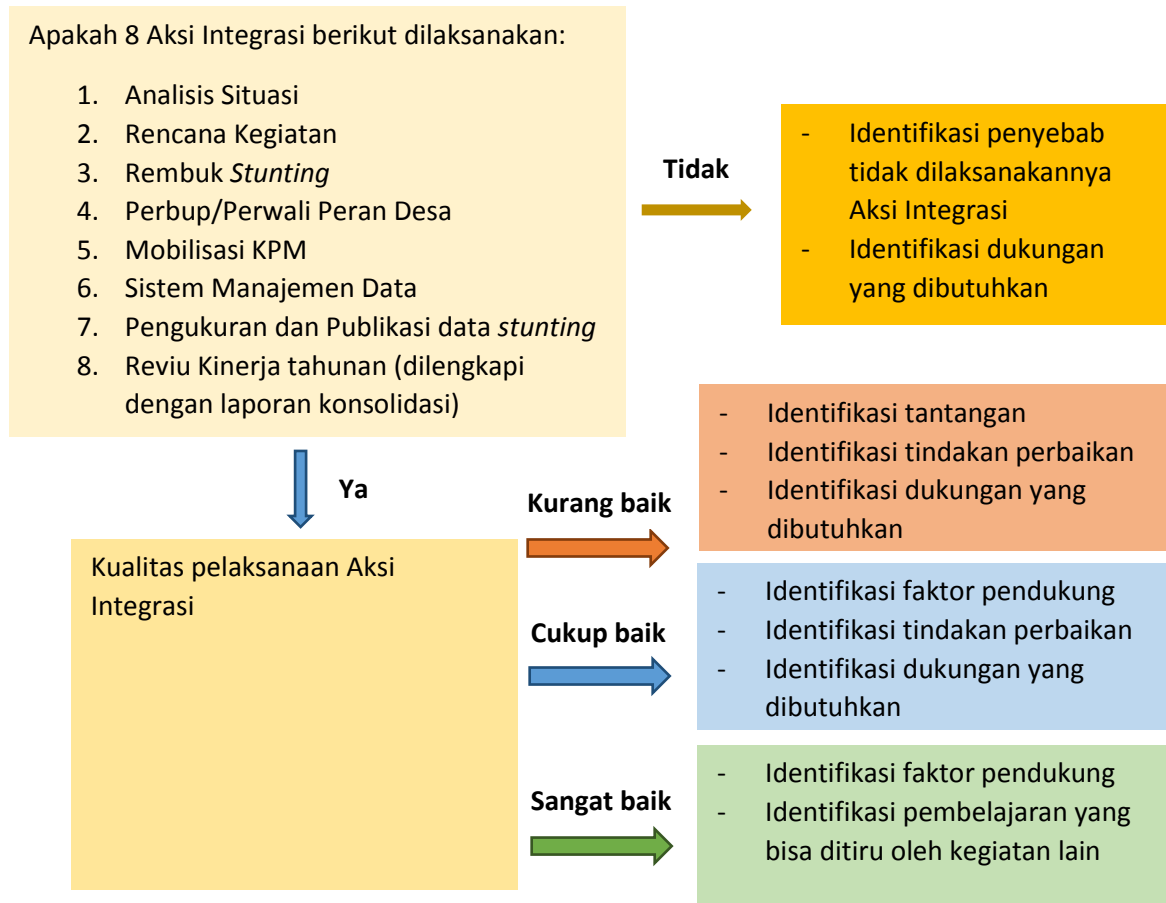
Setelah menyelesaikan reviu kinerja, Sekretariat Daerah dan Bappeda sebagai penanggung jawab menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan OPD pelaksana kegiatan terkait *stunting*. Dalam kegiatan ini, Tim Pelaksana akan menyampaikan hasil reviu yang sudah dilaksanakan dan

berdiskusi lebih lanjut dengan OPD untuk mendapat penjelasan (kendala/permasalahan maupun faktor keberhasilan) dari setiap kinerja kegiatan tersebut.

Dalam FGD ini, Tim Pelaksana meminta masukan dari OPD mengenai:

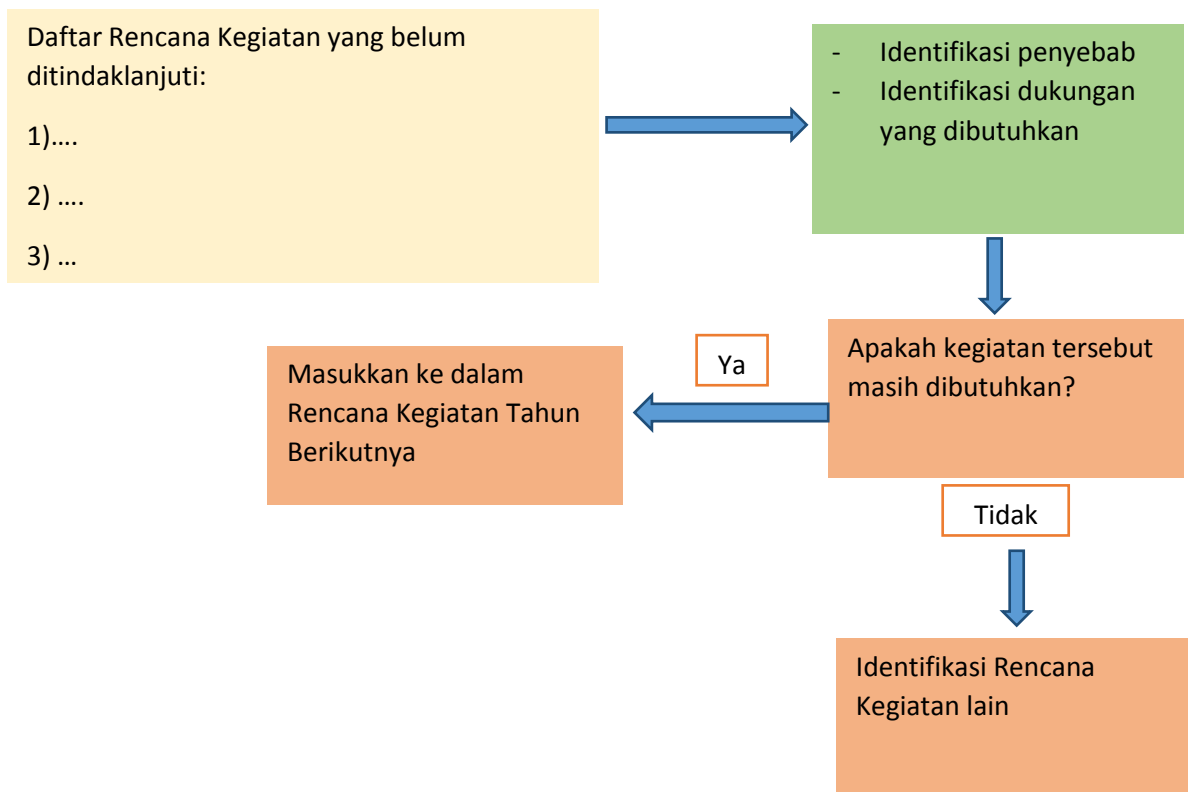
a. Pelaksanaan Aksi Integrasi Daerah:

#### Alur 8.1. Pelaksanaan Aksi Integrasi Daerah



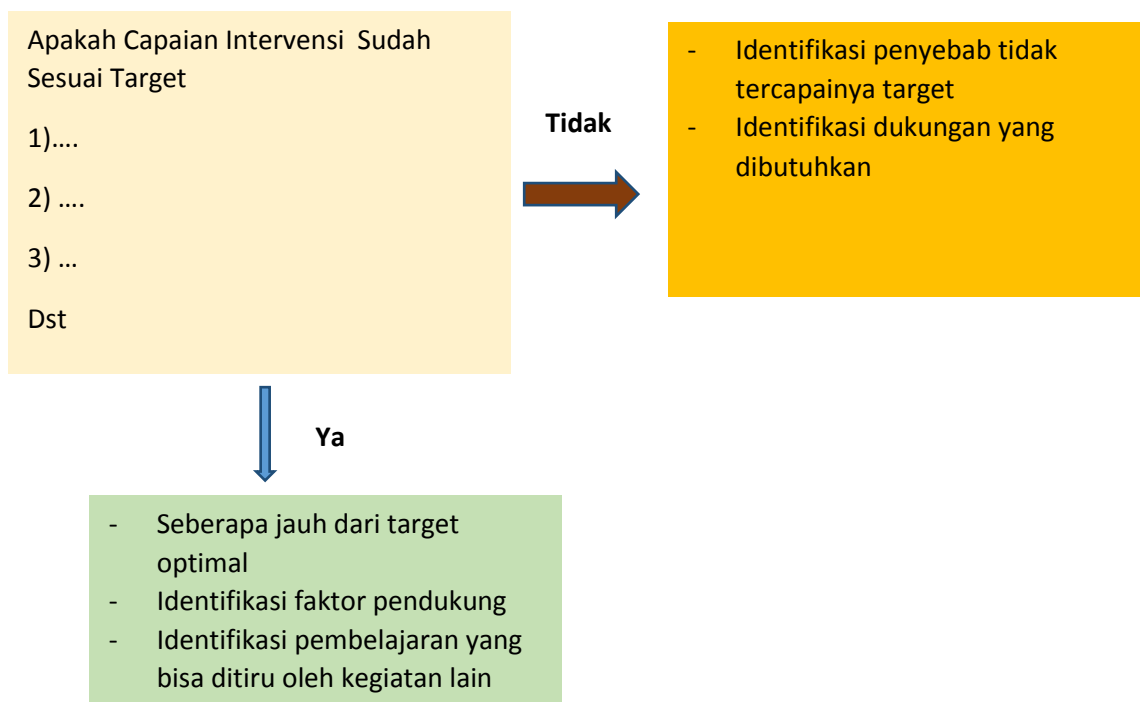
b. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Daerah

**Gambar 8.2. Alur Pelaksanaan Rencana Kegiatan Daerah**



c. Pelaksanaan tindakan intervensi terkait penurunan *stunting*

**Gambar 8.3. Alur Pelaksanaan Tindakan Intervensi Terkait *Stunting***



Dari hasil revidu kinerja dan FGD dengan OPD terkait, maka Tim Pelaksana mendapat gambaran lengkap mengenai hal sebagai berikut:

1. Kinerja kegiatan terkait *stunting* dari segi anggaran dan output kegiatan.
2. Butir Rencana Kegiatan yang sebaiknya dimasukkan kembali dalam Rencana Kegiatan tahun berikut dan yang tidak lagi dibutuhkan di tahun mendatang.
3. Tantangan yang dihadapi kegiatan yang kinerjanya kurang baik, rencana perbaikan, dan dukungan yang diperlukan untuk perbaikan.
4. Faktor pendukung kegiatan yang kinerjanya baik dan pembelajaran yang bisa ditiru oleh kegiatan lain.

Hasil kegiatan ini akan menjadi umpan balik bagi perencanaan dan pelaksanaan program terkait *stunting* untuk tahun anggaran berikutnya.

### Tahap Ketiga: Menyusun Dokumen Hasil *Revidu* Kinerja Tahunan

Hasil dari kegiatan *Revidu* Kinerja Tahunan dituangkan dalam Dokumen Hasil *Revidu* Kinerja Tahunan yang disiapkan oleh Tim Koordinasi Penurunan Stunting untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dan didiseminasikan kepada OPD dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini dapat berupa presentasi *power point* ataupun dituangkan dalam narasi tertulis.

Dokumen Hasil *Revidu* Kinerja Tahunan menjadi laporan konsolidasi yang memuat:

1. Penilaian terhadap capaian target kinerja pelaksanaan intervensi, program, dan kegiatan terkait penurunan stunting.
2. Daftar Rencana Kegiatan yang sudah ditindaklanjuti.
3. Butir Rencana Kegiatan yang akan diteruskan dan yang dipertimbangkan untuk dihapuskan di tahun berikutnya.
4. Daftar Aksi Integrasi Daerah yang sudah dilakukan beserta laporan hasil pelaksanaannya.
5. Penilaian terhadap kinerja pelaksanaan Aksi Integrasi dan hambatan serta peluangnya.
6. Rekomendasi untuk menjadi input pada Aksi Analisis Situasi dan Aksi Rencana Kegiatan tahun berikutnya

Dokumen ini bersifat singkat dan padat karena hanya menyampaikan kesimpulan dan umpan balik dari kegiatan *Revidu* Kinerja Tahunan. Umpan balik akan digunakan untuk memperbaiki perencanaan program/kegiatan terkait stunting di tahun berikutnya.

## Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota oleh Kementerian Dalam Negeri

Dokumen revidi kinerja yang telah disusun oleh kabupaten/kota akan menjadi bahan penilaian setiap tahunnya oleh Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda). Dalam pelaksanaannya, Ditjen Bina Bangda mendelegasikan tugas penilaian kinerja ini kepada Pemerintah Provinsi yang berperan untuk memimpin penilaian kinerja kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing. Penilaian dilakukan pada bulan Agustus tahun  $n+1$ .

Hasil akhir yang akan dinilai adalah meningkatnya cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif pada lokasi fokus penanganan stunting dan meningkatnya cakupan rumah tangga sasaran yang dapat mengakses intervensi gizi secara terintegrasi. Namun, hasil akhir tersebut akan tercapai setelah semua program/kegiatan yang dirancang selesai diimplementasikan. Oleh sebab itu, penilaian kinerja dilakukan secara bertahap berdasarkan kerangka hasil (*results framework*) dibawah ini.

1. Pada tahun pertama, penilaian dilakukan terhadap hasil pelaksanaan 4 (empat) Aksi integrasi gelombang pertama, yaitu:
  - Aksi #1 Analisis Situasi,
  - Aksi #2 Rencana Kegiatan,
  - Aksi #3 Rembuk Stunting,
  - Aksi #4 Perbup/Perwali tentang Peran Desa
2. Pada tahun kedua yang dinilai adalah kinerja pelaksanaan 4 (empat) Aksi Integrasi gelombang pertama ditambah dengan 4 (empat) Aksi Integrasi gelombang berikutnya, yaitu:
  - Aksi #5 Mobilisasi KPM
  - Aksi #6 Sistem Manajemen Data
  - Aksi #7 Pengukuran dan Publikasi Stunting
  - Aksi #8 Reviu Kinerja
3. Pada tahun ketiga dan selanjutnya, penilaian kinerja akan dilakukan terhadap hasil akhir yaitu: meningkatnya akses rumah tangga 1.000 HPK kepada intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif secara terintegrasi.

### Kerangka Hasil Yang Diharapkan dari Pelaksanaan 8 Aksi Integrasi

| Bidang         | Perencanaan dan Penganggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mobilisasi Peran Pemangku Kepentingan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pemanfaatan Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Evaluasi dan Pembelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aksi Integrasi | Aksi #1 Analisis Situasi<br>Aksi #2 Rencana Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aksi #3 Rembuk Stunting<br>Aksi #4 Perbup/Perwali terkait Peran Desa<br>Aksi #5 Mobilisasi Kader Pembangunan Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aksi #6 Sistem Manajemen Data Stunting<br>Aksi #7 Pengukuran dan Publikasi Stunting                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aksi #8 Reviu Kinerja tahunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hasil Antara   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda mengetahui sebaran angka stunting, kesenjangan intervensi, dan kendala penyampaian intervensi</li> <li>• Pemda mengetahui prioritas untuk perbaikan dalam alokasi anggaran dan penyampaian layanan</li> <li>• Pemda melakukan langkah-langkah perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, dan penyampaian layanan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh tingkat pemerintahan, unit layanan, dan Desa mengetahui peran dan tanggungjawabnya dalam penanganan stunting</li> <li>• Unit pemerintahan dan layanan tingkat kecamatan mendapatkan sumber daya yang cukup untuk mendukung layanan di tingkat desa</li> <li>• Kader Pembangunan Manusia tersedia di setiap desa untuk mengawal konvergensi layanan tingkat Rumah Tangga</li> <li>• Desa mengalokasikan anggaran yang cukup untuk stunting</li> <li>• Desa dapat melakukan kewajiban pelaporannya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam data stunting dan intervensi</li> <li>• Pemda melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kesenjangan dalam data stunting dan intervensi</li> <li>• Pemda melakukan pengukuran stunting secara reguler</li> <li>• Pemda mempublikasikan hasil pengukuran stunting dan kesenjangan intervensi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda melakukan revidi kinerjanya secara reguler</li> <li>• OPD dapat melaporkan kegiatan yang berjalan baik, tidak baik dan tindakan perbaikan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang</li> <li>• OPD dapat melaporkan kemajuan indikator cakupan layanan dibandingkan dengan baseline serta mengidentifikasi kendala untuk indikator yang lambat kemajuannya</li> <li>• Pemda dapat mengidentifikasi perbaikan alokasi anggaran berdasarkan revidi kinerja</li> </ul> |
| Hasil Lanjutan | Meningkatnya cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif pada lokasi yang diprioritaskan daerah<br>Meningkatnya cakupan rumah tangga 1000 HPK yang mengakses intervensi gizi secara simultan                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Strategi dan Mekanisme Penilaian Kinerja

**Penilaian kinerja pada tahun pertama dan kedua** dilaksanakan atas dasar paparan pelaksanaan aksi integrasi dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Pemaparan pelaksanaan kinerja dilaksanakan dalam forum tingkat provinsi yang dilaksanakan pada bulan Agustus setiap tahunnya. Pemaparan dari setiap Kabupaten/Kota menunjukkan capaian hasil antara seperti yang digambarkan dalam gambar diatas. Hasil antara tersebut harus disertai bukti-bukti yang dapat diverifikasi, sebagai contoh:

- Untuk membuktikan bahwa Pemda mengetahui sebaran angka stunting, gap intervensi dan kendala implementasi dalam penyampaian intervensi, pemda memaparkan data mengenai sebaran angka stunting, gap intervensi, serta serangkaian kendala implementasi yang berhasil diidentifikasi.
- Untuk membuktikan bahwa Pemda telah mengidentifikasi dan menindaklanjuti langkah-langkah perbaikan dalam perencanaan, penganggaran, dan penyampaian layanan, pemda memaparkan langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan diambil.
- Pemaparan dari masing-masing pemerintah kab/kota akan dinilai oleh panel ahli yang anggotanya dapat terdiri dari perwakilan OPD provinsi terkait (Bappeda, Setda, dan OPD lainnya), serta ahli yang ditunjuk baik yang berasal dari universitas maupun lembaga lain yang kredibel.

Atas dasar penilaian kinerja, Pemerintah provinsi memberikan umpan balik kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk rekomendasi mengenai tindakan apa yang harus dilakukan agar hasil akhir konvergensi dapat dicapai. Pemerintah provinsi juga memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota berkinerja terbaik, adapun bentuk penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan provinsi yang bersangkutan.

**Penilaian tahun ketiga** difokuskan kepada hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan aksi integrasi, yaitu tercapainya integrasi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada kelompok sasaran prioritas, yaitu rumah tangga yang memiliki anak dalam 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

Integrasi tersebut diukur berdasarkan sejauh mana rumah tangga 1000 HPK memiliki akses atau tercakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif secara komprehensif, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1-1 dan 1-2 pada Bab 2 pedoman ini. Namun demikian, jenis intervensi yang diprioritaskan untuk diukur integrasi cakupannya dapat disesuaikan jika terdapat perkembangan yang memerlukannya.

Secara umum, indikator yang akan digunakan adalah proporsi dari rumah tangga 1000 HPK yang memiliki akses terhadap seluruh jenis intervensi gizi prioritas.

*Contoh: Kabupaten X memiliki jumlah rumah tangga HPK sebanyak 10.000 rumah tangga, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap intervensi air bersih adalah 90 persen, sanitasi, 75 persen, suplementasi tablet tambah darah sebanyak 85 persen. Secara keseluruhan rumah tangga 1000 HPK yang memiliki akses kepada seluruh intervensi gizi prioritas adalah 65 persen. Maka, nilai indikator kinerja Kabupaten X pada tahun ketiga adalah 65 persen.*

Sumber data untuk mengukur cakupan akses kepada seluruh jenis intervensi prioritas tersebut dapat berasal dari berbagai data survey dan sensus yang dilakukan pemerintah, seperti SUSENAS, Pemantauan Status Gizi (PSG), dan lain-lain, dan tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan data yang berasal dari skor konvergensi tingkat desa (*village scorecard*) yang dikumpulkan oleh para kader pembangunan manusia.

Rincian pengaturan mengenai indikator dan data untuk penilaian tahun ketiga akan diatur secara lebih detail dalam panduan penilaian kinerja yang akan dikeluarkan di waktu yang akan datang.

**Contoh** outline paparan untuk masing-masing aksi yang termasuk penilaian tahun pertama

- Penanggung jawab aksi integrasi
- Jadwal pelaksanaan
- Pola sebaran stunting dalam wilayah kab/kota dan kesenjangan cakupan intervensi
- Rekomendasi hasil analisis situasi
- Tindak lanjut rencana kegiatan yang sudah dilakukan:
  - o Integrasi dalam dokumen perencanaan daerah
  - o Realokasi anggaran program yang sudah dilaksanakan untuk program prioritas
  - o Re-prioritisasi lokasi dan kelompok sasaran
  - o Penambahan program baru
  - o Penyelesaian kendala-kendala implementasi
  - o Penguatan koordinasi yang dilakukan
- Susunan agenda Rembuk Stunting
- Stakeholder yang terlibat dalam Rembuk Stunting
- Kesepakatan yang Dicapai dalam Rembuk Stunting (isi deklarasi Pemerintah Kab/Kota, komitmen Publik dalam penurunan stunting, dan kesepakatan Rencana Kegiatan)
- Tindakan yang diperlukan dari Desa dan Peran Kecamatan untuk Meningkatkan integrasi intervensi di tingkat desa
- Ruang lingkup dan substansi yang diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota tentang peran desa
- Kesepakatan yang dicapai pada Konsultasi Publik Rancangan PerBup/Perwali

**Contoh** outline paparan untuk penilaian tahun kedua ini adalah:

- Penanggung jawab aksi integrasi
- Sebaran desa yang memiliki KPM
- Operasional pembiayaan KPM
- Sistem pembinaan dan peningkatan kapasitas KPM
- Rencana keberlanjutan KPM
- Peran kecamatan dalam pembinaan KPM dan integrasi intervensi gizi di tingkat desa
- Ketersediaan data dan hasil identifikasi kesenjangan data
- Tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki system manajemen data
- Jadwal pelaksanaan pengukuran stunting dan nama kegiatan di kab/kota
- Upaya untuk memastikan kendali mutu kualitas pengukuran tinggi badan
- Ketersediaan dan tingkat kedalaman hasil pengukuran (per puskesmas atau kec atau desa)
- Cara-cara diseminasi dan publikasi hasil pengukuran yang diterapkan
- Waktu pelaksanaan reviu kinerja tahunan
- Tingkat realisasi rencana aksi integrasi
- Hasil penilaian mandiri kab/kota atas kinerja aksi integrasi yang telah dilaksanakan
- Kesimpulan dan pembelajaran dari tinjauan kinerja kegiatan
- Perkembangan cakupan layanan untuk rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di tingkat desa (*village score card*).
- Bagaimana laporan konsolidasi disosialisasikan

-----o0o-----